

SKRIPSI

**KEPEMIMPINAN HJ. SITI SURAIDAH SUHARDI SEBAGAI KETUA
DPRD PORVINSI SULAWESI BARAT DALAM PERPSEKTIF GENDER**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin



Disusun Oleh:

BADARIA

E041181306

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**KEPEMIMPINAN HJ. SITI SURAIDAH SUHARDI SEBAGAI KETUA
DPRD PORVINSI SULBAR DALAM PERPSEKTIF GENDER**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana di
Program Studi Ilmu Politik Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

OLEH

BADARIA

E041181306

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Penelitian

**KEPEMIMPINAN HJ SITI SURAIDAH SUHARDI SEBAGAI KETUA
DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF GENDER**

Yang Diajukan Oleh:

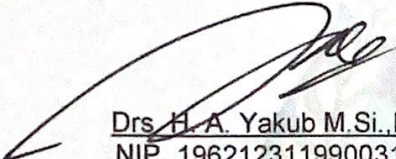
BADARIA

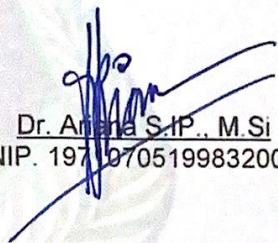
E041181306

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Drs. H. A. Yakub M.Si., Ph.D
NIP. 196212311990031023


Dr. Amalia S.IP., M.Si
NIP. 19710705199832002

Mengetahui

Ketua Departemen Ilmu Politik




Drs. H. A. Yakub M.Si., Ph.D
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN SKRIPSI
KEPEMIMPINAN HJ SITI SURAIDAH SUHARDI SEBAGAI KETUA
DPRD PROVINSI SULAWESI BARAT DALAM PERSPEKTIF GENDER

Disusun dan Diajukan Oleh :

BADARIA

E041181306

Dan dinyatakan telah memenuhi Syarat oleh Panitia Ujian Skripsi

pada Departemen Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Menyetujui,

PANITIA UJIAN

Ketua :Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D (.....
Sekretaris :Dr. Ariana Yunus. S.IP., M.Si. (.....
Anggota :Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ph.D (.....
Anggota :Dr. Sakinah Nadir, S.IP, M.Si (.....

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BADARIA

NIM : E041181306

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)

Program Studi : ILMU POLITIK

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Kepemimpinan Hj Siti Suraidah Suhardi Sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam Perspektif Gender" adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Juli 2022



METERAI
TEMPEL
88AAKX568824640
Badaria

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Rabbil Alamin, dengan memanjatkan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul **“Kepemimpinan Hj. Siti Suraidah Suhardi sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam Perpsektif Gender”** Penulisan usulan penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 Ilmu Politik.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak melalui hambatan dan tantangan, namun berkat bantuan berupa bimbingan, motivasi, dan saran dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat dalam skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.

Selain itu terimakasih yang setinggi-tingginya penulis tujukan kepada kedua orang tua tercinta penulis, ayahanda H.Imung dan Ibunda HJ.Sannang yang telah memberikan kasih sayang, nasehat dan cinta begitu tulus tentunya takkan bisa penulis balas. Ungkapan kasih sayang dan rasa terima kasih juga penulis sampaikan kepada saudara-saudari penulis Ibrahim, Imran, Jamila, serta kedua adik saya Fauziah dan Amira terima kasih atas doa, dukungan dan semangat yang selalu diberikan.

Penullis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ibu Dr. Sakinah nadir S.IP., M.Si selaku penasehat akademik (PA), Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D dan Dr. Ariana Yunus. S.IP., M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah banyak membantu, memberikan arahan, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing penulis hingga ujian akhir.

Dalam hal ini untuk kegiatan penyusunan skripsi penulis tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik materil maupun non-materil. Sehingga kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si, Ph.D selaku dekan FISIP UNHAS yang telah membantu dan memberi ruang pada penulis selama menempuh perkuliahan di lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Hj. Hasniati, M.Si, Dr. A. Muh. Iqbal Sultan, M.Si. selaku Wakil Dekan FISIP UNHAS yang telah memberikan kemudahan terhadap penulis dalam urusan-urusan akademik.
4. Bapak Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Politik yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam urusan-urusan administrasi di Program Studi Ilmu Politik.

5. Terima kasih kepada bapak dan ibu dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Unhas kepada Bapak Prof. Dr. Muhammad, M.Si, Bapak Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Bapak (Alm)Prof. Dr. Muh. Kausar Bailusy, MA, Bapak (Alm) Prof. Dr. H. Basir Syam, M.Ag, Bapak Drs. A. Yakub, M.Si, Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, M.Si, Bapak Andi Naharuddin, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Muhammad Saad, MA, Bapak Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si, Bapak Dr. Imran, S.IP, M.Si, Bapak Zulhajar, S.IP, M.Si, Ibu Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si, Ibu Dr. Ariana Yunus M.Si, Ibu Sakinah Nadir, S.IP, M.Si, Ibu Ummi Suci Fathya Bailusy, S.IP, M.Si, dan Ibu Dian Ekawati, S.IP, Ma yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada peneliti selama proses perkuliahan.
5. Terima Kasih kepada seluruh Staf Akademik Departemen Ilmu Politik bapak Syam dan ibu Musriati yang telah banyak memberikan bantuan bidang keadministrasian kepada peneliti selama perkuliahan.
6. Terima Kasih untuk semua Informan atas waktu dan informasi yang diberikan kepada penulis
7. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Ilmu Politik angkatan 2018, atas segala kerjasama dan pemberian informasi selama masa perkuliahan.

8. Terima kasih untuk Senior-senior Keluarga Kecil identitas Unhas telah menjadi rumah yang nyaman dan dikenalkan dengan orang-orang baik untuk berbagi cerita, ilmu kepenulisan sehingga memudahkan penulis dalam mengerjakan skripsi, motivasi selama kuliah. Terima kasih juga untuk Sobat idetitas18 Santi Kartini, Hafis Dwi Fernando, Irmalasari, Finsensius T Sesa, Nadhira Noor Sidiqi R, Mufliha atas motivasi dan dukungan moral menjadi penyemangat bagi penulis dengan cerita kerandomannya, teman mencari berita sebelum memasuki meja rapat demi mengejar deadline.
9. Kepada keluarga besar Himapol FISIP Unhas yang telah menjadi wadah pembelajaran di luar perkuliahan. Himapolku, Himapolmu, Himapol Kita Semua. Kepada Senior-senior yang senantiasa membantu dan mengarahkan penulis khususnya kak Muh. Fichriyadi Hastira telah membantu dalam proses penyusunan skripsi penulis.
10. Kepada saudara saudariku Revolusi18. Terima kasih telah menjadi saudara yang baik dalam perjalanan belajar bersama di Ilmu Politik Fisip Unhas.
11. Terima kasih kepada saudari-saudari terbaik penulis sekost teruntuk Nurfadilla, Gina Yulianti, dan Pirda yang merupakan pemadam kelaparan, serta tukang ojek untuk penulis dan tempat terbaik penulis untuk berbagi keluh kesah, pendengar terbaik

sepanjang masa, sekaligus pencipta bahagia terbaik bagi penulis suka duka bermahasiswa bersama mereka menjadi lebih berwarna.

12. Kepada saudari-sudari terbaik sepanjang perkuliahan Gina, Uppa, Pirda, Salmi, Vina, Azkia Aziza, Sri Widyawati Ahmad, Fitriani, Nurul Mutya Yunus, Linda Amalia Sari, Rahmatang, Karina Wardah dan Rahmayanti

13. Terima kasih kepada teman-teman KKN Gelombang 107 Zona Luar Sulsel 2 cabang polman atas bantuan dan doanya kepada penulis.

14. Terima kasih kepada teman seperjuangan sekolah menengah pertama hingga saat ini Rahmania.

Selebihnya terimakasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu persatu. Sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai sejarah dalam penulis menjadi mahasiswa. Akhirnya penulis menyadari atas segala kekurangan yang terdapat pada skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Sekian dan terimakasih.

Makassar, 12 Juni 2023

Badaria

ABSTRAK

Badaria, Nomor induk E041181306, menyusun skripsi yang berjudul Kepemimpinan Hj Siti Suraidah Suhardi Sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam Perspektif Gender. Di bawah bimbingan Andi Yakub selaku Pembimbing Utama dan Ariana Yunus selaku Pembimbing Pendamping.

Kehadiran kaum perempuan dalam dunia politik merupakan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki kesetaraan gender. Perspektif gender mengarah pada suatu pandangan atau pemahaman tentang peran perempuan dibedakan secara kodrati, dan peran gender yang ditetapkan secara sosial budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami peran Hj Siti Suraidah Suhardi sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam perspektif gender. Penelitian ini berfokus pada Siti Suraidah Suhardi selaku Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dan bagaimana mendeskripsikan upaya Siti Suraidah dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui, memahami dan menganalisis jenis penelitian pada Hj Siti Suraidah Suhardi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori kepemimpinan transformasional dan perspektif gender.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ibu Suraidah mengupayakan gaya kepemimpinan feminin dalam menjalankan peran kepemimpinannya. Dalam memecahkan masalah, ia membangun hubungan emosional dengan masyarakat dan bawahannya. Kemudian pendekatan berorientasi tugas atau kerja dipadukan dengan gaya maskulin. Gaya kepemimpinan maskulin feminis yang menekankan kombinasi karakteristik yang dikaitkan dengan kepemimpinan maskulin dan feminin bagaimana gaya ini mengintegrasikan kekuatan, empati, dan kepekaan social. Diantara maskulin dan feminin ada androgini yakni tidak bersifat maskulin maupun feminin alias bisa dianggap maskulin maupun feminin sekaligus. Orang yang bersifat androgini mengombinasikan dalam dirinya sifat-sifat maskulin maupun feminin. Gaya kepemimpinan maskulin feminis dapat membantu dalam mencapai tujuan transformasi dan memberdayakan individu serta mendorong persamaan gender dalam konteks kepemimpinan.

Kata Kunci : Pemimpin Perempuan, Maskulin-feminin, Kepemimpinan perempuan

ABSTRACT

Badaria, host number E041181306, compiled a thesis entitled Hj Siti Suraidah Suhardi as chairman of the western sulawesi province in gender perspective. Under the guidance of Andi Yakub was the primary adviser and Ariana Yunus was the companion guide.

The presence of women in politics is a prerequisite to the equality of gender perspectives of gender toward a view or understanding of the role of women is fundamentally distinguished, and the gender role of this research culture is intended to know and understand the role of hj siti suraidah suhardi as head of the western sulawesi province in gender. This research focuses on siti suraidah suhardi as chairman of the western sulawesi province and how it describes siti suraidah's efforts in fulfilling his duties and responsibilities.

The research approach used in this study is a descriptive qualitative approach aimed at knowing, understanding and analyzing the type of research at hj siti suraidah suhardi. Data collection takes place through interviews and documentaries. The theories used are transformational leadership theories and gender perspectives.

The result of this study suggests that suraidah's mother was working at a feminine leadership style in her role of leadership. In solving problems, he builds emotional relationships with his community and his subordinates. Then a task - or work-oriented approach is combined with a masculine style. A masculine leadership style that emphasizes the combination of characteristics associated with masculine and feminine leadership how it integrates social strengths, empathy, and sensitivity. Between the masculine and the feminine there isa androphic between masculine and feminine, as well as feminine alike. The androgyny person combines in himself the masculine and feminine qualities. The masculine leadership style can help in achieving the goal of transforming and empowering individuals and encouraging gender equations in leadership context.

Key words: female leaders, feminine masculinity, female leadership

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perspektif Gender	10
2.2 Teori Kepemimpinan	16
2.2.1 Pengertian kepemimpinan	16
2.2.2 Pengertian Kepemimpinan Politik	18
2.2.3 Teori-teori Kepemimpinan	20
2.3 Telaah Pustaka	24
2.4 Skema Penelitian	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Obyek Penelitian	29
3.2 Tipe dan Jenis Penelitian	29

3.3 Sumber Data	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5 Teknik Analisis	35
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	37
4.1. Gambaran Umum DPRD Provinsi Sulawesi Barat	37
4.1.1. Tugas dan wewenang ketua DPRD	39
4.2. Profil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Hj Sitti Suraidah Suhardi	41
4.3. Dinamika Politik Pemerintah Kabupaten Mamuju	43
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
5.1. Peran Hj Siti Suraidah Suhardi Sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat	46
5.2 Gaya Kepemimpinan Siti Suraidah Suhardi Sebagai Ketua DPRD	50
5.2.1. Gaya Kepemimpinan Maskulin	50
5.2.2. Gaya Kepemimpinan Feminin	55
BAB VI PENUTUP	59
6.1 Simpulan	59
6.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN	66

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gender yang sering dikaitkan dengan jenis kelamin merupakan hal yang sama oleh masyarakat, padahal keduanya memiliki makna dan konotasi yang berbeda. Jenis kelamin merupakan sesuatu yang tak dapat dirubah dan bersifat kodrati, yang telah ditentukan sejak dalam kandungan oleh Tuhan, sedangkan gender merupakan peran sosial yang dapat dipertukarkan, hal ini dikarenakan gender dibentuk oleh lingkungan baik keluarga maupun masyarakat. Namun hal ini belum dipahami dengan baik oleh kelompok masyarakat tertentu. Sehingga menimbulkan pandangan bahwa laki-laki lebih utama daripada perempuan, dan yang pemimpin hanya boleh dipegang oleh laki-laki.

Perempuan sebagai pemimpin masih sangat jarang karena pandangan masyarakat bahwa perempuan hanya sebagai pendamping, tidak dapat membuat keputusan dengan sifat emosionalnya. Sehingga ungkapan laki-laki merupakan pemimpin terus ada dalam kehidupan masyarakat luas. Pemimpin yang selalu di identikkan dengan laki-laki karena maskulinitasnya, sehingga perempuan di anggap sebelah mata untuk mengambil peran sebagai pemimpin, padahal berdasarkan data banyak perempuan yang telah menduduki jabatan sebagai pemimpin,

akan tetapi untuk tampil sebagai pemimpin ada hambatan yang seolah-olah tidak terlihat tetapi dalam kenyataannya merintang akses dalam menuju kepemimpinan puncak antara lain isu gender dan ketidakadilan sifatnya melekat dan dikonstruksi secara sosial maupun kultural.

Kuatnya hegemoni patriarki berakar pada perspektif tentang kodrat, tugas, dan peran perempuan yang tradisional meniscayakan bahwa peran dan fungsi perempuan diidentifikasi sebagai pelaku peran-peran reproduksi dan peran-peran domestik terobjektifikasi dan terinternalisasi dalam masyarakat. Hasil penelitian Ayu Putu Natri¹ menunjukkan bahwa, terdapat dua faktor yang menyebabkan persentase perempuan dalam politik masih kecil, yaitu; pertama, faktor internal yang meliputi sumber daya perempuan, adanya pandangan bahwa politik itu keras, dan adanya stereotype yang dilabelkan pada perempuan. Kedua, faktor eksternal yang meliputi sistem pemilu, peran organisasi politik, dan nilai budaya.

Pada (Q.S an-Nisa[4]:34) "Para laki-laki (suami) itu bertanggung jawab terhadap para perempuan(istri), ketika mereka memiliki kapasitas yang diberikan oleh Allah swt. Kepada mereka dan (mampu) menafkahi dari harta yang mereka miliki... Dengan demikian dalam tafsir mubadalah, bukan menegaskan mengenai kepemimpinan atau tanggungjawab laki-laki terhadap perempuan, dengan basis jenis kelamin. Dalam islam,

¹ Natri, P. A (2008) Perempuan Dan Politik, 4-5

seseorang tidak diberikan tanggung jawab hanya karena memiliki jenis kelamin semata, tetapi karena kemampuan dan pencapaian yang dimiliki.²

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa pemimpin tidak hanya berdasarkan satu jenis kelamin melainkan berdasarkan kemampuan. Namun dalam penafsiran masyarakat luas menjadikan ayat tersebut memberikan legitimasi kekuasaan laki-laki terhadap perempuan. Hal tersebut semakin diperkuat dengan pelegitimasi dengan penggunaan “agama”. Dalam hal ini Berger berpandangan bahwa agama merupakan benteng paling tangguh untuk melawan eksistensi tanpa arti (meaninglessness). Dengan kata lain, agama telah menjadi sumber pembenaran dunia sosial yang paling efektif terlebih jika menyangkut rana politik³.

Berdasarkan beberapa masalah yang sering dihadapi perempuan dalam aspek kehidupan di masyarakat. Sehingga terkesan bahwa selama ini banyak perempuan yang tidak mau terlibat dengan persoalan partai, dan kemudian kendala lain yang sering terjadi di beberapa partai yaitu terjadinya diskriminasi terhadap perempuan bahkan ketidakadilan yang dialami oleh perempuan dalam kegiatan kemasyarakatan.

Padahal efektivitas seorang pemimpin ditentukan oleh kepiawaiannya mempengaruhi dan mengarahkan para anggotanya.

² Faqihuddin. Qiraah Mubadalah tafsir progresif untuk keadilan gender dalam islam hal 379-380

³ Dra. Nila Sastrawati, M.Si. Gender dan Politik : Perspektif Postfeminisme hal 81

Pemimpin dapat mempengaruhi semangat dan kegairahan kerja, keamanan, kualitas kehidupan kerja dan juga tingkat prestasi suatu organisasi. Para pemimpin juga memainkan peranan penting dalam membantu kelompok, individu untuk mencapai tujuan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di satu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian satu atau beberapa tujuan.

Kehadiran kaum perempuan dalam dunia politik merupakan prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang memiliki kesetaraan gender. Keterwakilan perempuan dalam parlemen merupakan hal yang sangat penting, karena diyakini dapat memberikan perubahan positif dalam proses pembuatan kebijakan yang lebih baik untuk masyarakat.⁴ Dengan memperkenalkan kuota 30% perwakilan perempuan di legislatif, berbagai sumberdaya yang dibutuhkan untuk mempengaruhi keputusan kebijakan yang menjamin hak-hak kelompok perempuan dan masyarakat luas serta membantu meningkatkan kualitas masyarakat diharapkan dapat dilimpahkan kehidupan.

Namun kepentingan mereka masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat, terutama sistem politik yang curang terhadap kehadiran

⁴ Azza Karam dan Joni Lovenduski, "Perempuan di Parlemen: Membuat Perubahan," dalam Azza Karam dan Julie Ballington (ed-), *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Hiasan*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan dan International Institute for Democracy and Electoral.

perempuan di legislatif dalam banyak hal, salah satunya kerjasama dan peran aktif di partai politik. Kehadiran perempuan yang bergerak maju dan menduduki berbagai posisi publik memungkinkan mereka membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai sosial dan ekonomi baru untuk kepentingan mereka sendiri.

Perjuangan kaum perempuan untuk mampu terlibat secara aktif dalam dunia politik bukanlah perjuangan yang singkat. Terlihat nyata bahwa telah terjadi transformasi dari bentuk perjuangan perempuan dalam pembangunan bangsa ini. Dari yang berawal pada gerakan politik perempuan, kemudian bertransformasi menjadi keterwakilan politik perempuan. Transformasi tentunya tidak terjadi begitu saja. Banyak peristiwa dan pengalaman yang membuat semua itu mengalami perubahan. Tuntutan zaman sebelum kemerdekaan kala itu lebih menitikberatkan pada perjuangan untuk melawan penjajah.

Tidak ada asumsi lain bagi perempuan Indonesia untuk berkontribusi bagi bangsanya selain berjuang di medan perang untuk merebut kemerdekaan. Ketika kemerdekaan telah diraih, mereka pun mulai memikirkan permasalahan-permasalahan mendasar yang dialami oleh kaumnya. Mulai dari masalah pernikahan, kesejahteraan keluarga, hingga kesehatan reproduksi. Perjuangan untuk menuntut perhatian pemerintah pada masalah-masalah mendasar tersebut pada masa setelah kemerdekaan lebih cenderung pada pola memberikan tekanan pada pemerintah.

Jadi perjuangan dilakukan dari luar sistem. Meskipun tidak dapat dipungkiri terdapat beberapa nama perempuan yang duduk di dalam parlemen pada masa Presiden Soekarno. Pengkerdilan makna perempuan sebagai manusia setara dengan laki-laki yang ikut berjuang bagi bangsa ini pada masa Orde Baru menjadi titik tolak kebangkitan kaum perempuan ketika reformasi digulirkan. Sebuah kesadaran pentingnya peran wakil dan pemimpin perempuan dalam mengatasi berbagai permasalahan kaumnya sendiri menjadi sangat tinggi.

Para aktivis perempuan pada masa awal reformasi menyadari betul bahwa perempuan harus terlibat dalam proses perumusan kebijakan yang sangat menyentuh kaumnya. Lalu bagaimana hal ini bisa diraih? Tentunya dengan menempatkan orang-orang yang amat mengerti dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh kaum perempuan itu sendiri di lembaga yang merumuskan kebijakan tersebut. Maka siapa lagi yang mampu memahami kalau bukan perempuan itu sendiri.

Jumlah kaum perempuan yang hampir setengah dari penduduk bangsa ini dibandingkan dengan wakil perempuan yang duduk di parlemen selama ini sama sekali tidak representatif. Pada saat inilah gerakan perempuan Indonesia mengubah haluannya dari sekadar

gerakan politik yang berada di luar sistem politik itu sendiri, menjadi gerakan politik dengan tujuan keterwakilan politik perempuan.⁵

Keterwakilan perempuan dalam politik ada berbagai sektor salah satunya kepemimpinan perempuan pertama di Kabupaten Mamuju, diawali oleh Hj. Siti Suraidah Suhardi, yang mengawali karir politiknya pada tahun 2006 partai demokrat merekrut suraidah menjadi anggota. Kemudian pada tahun 2007 suraidah terpilih sebagai bendahara Partai Demokrat. Ia terpilih dengan suara mutlak yang mengantarkan dirinya menjadi wakil ketua DPRD Mamuju 2009-2014. Kemudian menjabat sebagai Ketua DPRD Mamuju periode 2014-2019. Pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2019, ia maju sebagai calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat periode 2019-2024 dari Dapil Mamuju. Dan terpilih menjadi ketua DPRD Sulawesi Barat⁶.

Berdasarkan hal yang dipaparkan diatas, menarik kemudian untuk melihat bagaimana sosok Hj. Sitti Suraidah Suhardi sebagai seorang pemimpin dalam menangani masalah serta bagaimana menjalankan peran selaku pemimpin dan bagaimana perannya dalam pengambilan kebijakan di tingkat daerah di Kabupaten Mamuju maupun Provinsi Sulawesi Barat dalam dunia politik.

⁵ Perempuan, Partai Politik, dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal hal 41

⁶<https://kumparan.com/muhammad-nur1511652684716/idha-suhardi-unsur-pimpinan-dprd-di-usia-23-tahun-bagian-satu/4> (di akses 10 Oktober 2022)

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Hj Siti Suraidah Suhardi menjalankan perannya sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menggambarkan model gaya kepemimpinan Hj Siti Suraidah Suhardi sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat
- b. Untuk menggambarkan upaya Hj Siti Suraidah dalam mempraktikkan gaya kepemimpinannya sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat untuk menjalankan peran dan tugasnya.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat dari penelitian ini adalah menjadi acuan bagi pembaca atau masyarakat untuk mengetahui apa efek yang akan diberikan dari penggunaan perspektif gender dalam upaya untuk melihat bagaimana peran kepemimpinan Hj Siti Suraidah Suhardi sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat.

- b. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana perkembangan dinamika politik di

Indonesia terutama mengenai Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender. Utamanya di Kabupaten Mamuju.

c. Manfaat Akademis

Dalam wilayah akademis, memperkaya kajian ilmu politik untuk pengembangan keilmuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepemimpinan perempuan, khususnya tentang bagaimana Hj Siti Suraidah Suhardi menjalankan perannya sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi barat.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perspektif Gender

Perspektif gender mengarah pada suatu pandangan atau pemahaman tentang peran perempuan dibedakan secara kodrati, dan peran gender yang ditetapkan secara sosial budaya. Perbedaan gender akan menjadi masalah jika perbedaan itu mengakibatkan ketimpangan perlakuan dalam masyarakat serta ketidakadilan dalam hak dan kesempatan baik bagi laki-laki maupun perempuan. (Susanti, 2000: 2-3)

Kata "Gender" berasal dari bahasa Inggris, gender yang berarti "jenis kelamin". Dalam *Webster's New World Dictionary*, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku⁷. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller⁸. Secara etimologi (bahasa), kata "gender" berasal dari bahasa Inggris, gender berarti "jenis kelamin", sedangkan menurut bahasa Arab gender berarti "مسوَجسية" Sedangkan secara terminologi (istilah), gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

⁷ Nassaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender*, (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), hlm 29.

⁸ Green, R. (2010). Robert Stoller's sex and gender: 40 years on. *Archives of sexual behavior*, 39(6), 1457-1465.

Istilah gender belum masuk dalam perbendaharaan kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi dalam pemakaian berikutnya istilah ini selalu dikaitkan dengan budaya⁹. Istilah gender lebih banyak menunjuk kepada perbedaan status dan peranan laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam proses sosial dan budaya yang panjang¹⁰.

Didalam *Webster's Studies Encyclopedia* dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat¹¹. Istilah gender diperkenalkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil.¹² Ciri-ciri dari sifat itu merupakan sifat yang dapat dipertukarkan, misalnya ada laki-laki yang lemah lembut, ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain.¹³

⁹ Azyumardi Azra, *Kajian Tematik al-Qur'an tentang Kemasyarakatan* (Bandung: Angkasa, 2008), hlm 315.

¹⁰ Sinulingga, R. dalam *Jurnal Wawasan*, Juni, Volume 12, Nomor 1, Medan: USU 2006, h. 47.

¹¹ Ibid, hlm 30

¹² Herien Puspitawati, "Konsep, Teori dan Analisis Gender", dalam artikel Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor 2013, h. 1. <http://ikk.fema.ipb.ac.id/v2/images/karyailmiah/gender.pdf>

¹³ M. Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 8-9.

Dalam memahami konsep gender, Mansour Fakih¹⁴ membedakannya antara gender dan seks (jenis kelamin). Pengertian seks lebih condong pada pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia berdasarkan ciri biologis yang melekat, tidak berubah dan tidak dapat dipertukarkan. Dalam hal ini sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau 'kodrat'. Sedangkan konsep gender adalah sifat yang melekat pada laki-laki atau perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural dan dapat dipertukarkan. Jadi gender diartikan sebagai jenis kelamin sosial, sedangkan seks adalah jenis kelamin biologis. Maksudnya adalah dalam gender ada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial¹⁵.

Perspektif gender menekankan perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan berakar pada ideologi gender. Ideologi gender ini bersumber dari konstruksi sosial masyarakat, bahwa secara biologis laki-laki dan perempuan itu berbeda, maka peran mereka juga harus berbeda. Perbedaan ini telah disosialisasikan sejak lahir dan akhirnya melahirkan ketidakadilan dalam berbagai perilaku kehidupan bermasyarakat. Jadi menurut perspektif ini, penyebab kesenjangan bukan terletak pada ketidakmampuan perempuan seperti perspektif human capital tetapi lebih disebabkan ideologi, sistem, struktur yang bersumber dari ketidakadilan gender. Manifestasi ideologi ini tercermin dalam strategi, rencana, kebijakan dan program pembangunan (Effendi dalam Santoso, 2004).

¹⁴ Fakih, M. (2003). Gender field schools. LEISA-LEUSDEN-, 19, 26-27.

¹⁵ Iswah Adriana, Kurikulum Berbasis Gender, Tadrîs. Volume 4. Nomor 1. 2009 hlm 138.

Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional, atau keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan, perkasa. Ciri dari sifat itu sendiri merupakan sifat-sifat yang dapat dipertukarkan. Artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Konsep yang pertama berhubungan dengan konstruksi sosial, budaya dan psikis perempuan, sedangkan *female versus male* lebih merupakan konsep biologis.

Tabel 1.

Karakteristik feminin dan maskulin menurut beberapa ahli

	Feminitas	Maskulinitas
Capra	Seimbang Responsif Kerjasama Intuitif Mempersatukan	Banyak tuntutan Agresif Kompetitif
Boydell dan Hammond	Tidak logis Bagian dari sifat alami Sistematis Otak kanan Bersifat patuh Penyatu Lunak Menang-menang Berjarak Membebaskan	Logis Pisah dari sifat alami Mekanis Otak kiri Bersifat dominan Pemisah Keras Menang-Kalah Berentetan Mengontrol
Marshall	Saling ketergantungan Penggabungan Mendukung Kerjasama Kemauan menerima	Penonjolan diri Pemisahan Independen Kontrol Kompetisi

Sumber : Sparrow, J., and Rigg, C., (1993)

Sejalan dengan itu, gender merupakan konsep hubungan sosial yang membedakan (memilahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai kehidupan dan pembangunan.¹⁶

Dari definisi di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa gender adalah peran yang dibangun secara sosio kultural antara laki-laki dan perempuan. Peran dan atribut diberikan kepada laki-laki, karena adat dan budaya, peran dan atribut ini biasanya dilakukan atau hanya dimiliki oleh laki-laki, begitu juga oleh perempuan. Konsep jenis kelamin adalah kenyataan secara biologis yang membedakan antara manusia dimana lebih diidentikkan dengan perbedaan tubuh laki-laki dan perempuan.

Untuk lebih jelas perbedaan gender dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:¹⁷

¹⁶ Dwi Narwoko dan Bagong Yuryanto, Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004) hlm 335.

¹⁷ Orinton, "Konsep dan Teori Gender", dalam <https://gendernews88.wordpress.com/2010/09/07/konsep-dan-teori-gender/>. Diakses 24 Oktober 2022

Tabel 2

Perbedaan gender dengan Jenis Kelamin

Gender	Jenis Kelamin
Menyangkut perbedaan peran, fungsi, dan tanggungjawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan masyarakat.	Menyangkut perbedaan organ biologis laki-laki dan perempuan, khususnya pada bagian-bagian alat reproduksi.
Peran sosial dapat berubah: Peran istri sebagai ibu rumah tangga dapat berubah menjadi pencari nafkah, disamping menjadi istri juga	Peran reproduksi tidak dapat berubah: Sekali menjadi perempuan dan mempunyai rahim, maka selamanya akan menjadi perempuan dan sebaliknya.
Peran sosial dapat dipertukarkan: Untuk saat-saat tertentu, bisa saja suami tidak memiliki pekerjaan sehingga tinggal di rumah mengurus rumah tangga, sementara istri bertukar peran untuk bekerja mencari nafkah bahkan sampai ke luar negeri.	Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan: tidak mungkin laki-laki melahirkan dan perempuan membuahi.
Peran sosial bergantung pada masa dan keadaan.	Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang masa.
Peran sosial bergantung pada budaya masyarakat tertentu.	Peran reproduksi kesehatan berlaku di mana saja.
Peran sosial berbeda antara satu kelas/strata sosial dengan strata lainnya.	Peran reproduksi kesehatan berlaku bagi semua kelas/strata sosial.
Peran sosial bukan kodrat Tuhan tetapi buatan manusia	Peran reproduksi berasal dari Tuhan atau kodrat.

Sumber: Orinton, September 2010

Menurut Partini¹⁸, hal ini terjadi sistem patriarkat tidak memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan perempuan dipandang sebagai saingan. Akibatnya, kesetaraan gender bagi perempuan (gender equality) mengenai peran dan statusnya dalam politik menjadi terbatas. Dampak dari ketimpangan gender adalah aspirasi perempuan tidak dikomunikasikan melalui jalur politik yang ada. Diskriminasi politik berbasis gender sudah ada di Indonesia sejak lama. Keadaan ini semakin memperkuat apa yang dikatakan Beauvoir (1993), bahwa perempuan cenderung dipandang sebagai 'kelas kedua' yang terabaikan.

2.2 Teori Kepemimpinan

2.2.1 Pengertian kepemimpinan

Kepemimpinan (leadership) berkenaan dengan seseorang memengaruhi perilaku orang lain untuk suatu tujuan. Dengan kekuasaan, pemimpin dapat memengaruhi perilaku para bawahannya. Kekuasaan dapat dibagi menjadi lima, yaitu: (1) kekuasaan keahlian (expert power); (2) kekuasaan legitimasi (legitimate power); (3) kekuasaan referensi (referent power); (4) kekuasaan penghargaan (reward power); dan (5) kekuasaan paksaan (coercive power). Disamping berhubungan dengan kekuasaan, kepemimpinan juga erat kaitannya dengan karakter. Berbagai upaya riset dilakukan untuk mengidentifikasi karakter-karakter yang konsisten dengan kepemimpinan. Dinyatakan juga bahwa pencarian untuk

¹⁸ Partini, P. (2013). Glass Ceiling dan Guilty Feeling sebagai Penghambat Karir Perempuan di Birokrasi. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 5(2), 16882.

mengidentifikasi seperangkat karakter yang membedakan pemimpin dan pengikut dan antara pemimpin yang efektif dan tidak efektif, banyak yang gagal. Hasil yang paling dapat diterima adalah riset yang bertujuan hanya untuk melakukan identifikasi terhadap karakter-karakter yang dapat dikaitkan secara konsisten dengan kepemimpinan¹⁹.

Terminologi kepemimpinan muncul sebagai konsekuensi logis dari perilaku dan budaya manusia yang terlahir sebagai individu yang memiliki ketergantungan sosial begitu tinggi dalam memenuhi berbagai kebutuhannya, kepemimpinan dibutuhkan manusia karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan tertentu pada manusia. Pemimpin adalah individu manusianya, sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang melekat padanya sebagai pemimpin, secara umum kepemimpinan dapat diartikan sebagai dasar kemampuan atau bakat, serta kelebihan seseorang untuk memimpin bawahan, kelompok dan masyarakat.

Dari pengertian para ilmuwan ini dapat ditarik pemahaman bahwa kepemimpinan adalah berhubungan dengan proses mempengaruhi dari seseorang pemimpin kepada pengikutnya atau anggotanya guna mencapai tujuan organisasi dimana terdapat seni mengatur, mengelola dan mengarahkan orang dengan kepatuhan, kepercayaan, kehormatan, kerjasama, semangat, dan potensi-potensi yang ada guna mencapai tujuan yang di cita-citakan.

¹⁹ <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/40982> (di akses 05 Oktober 2022)

2.2.2 Pengertian Kepemimpinan Politik

Konsep kepemimpinan politik merupakan pembahasan yang cakupannya luas. kepemimpinan adalah suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang yang dipengaruhi, serta memiliki kemampuan menggunakan sumber pengaruh secara efektif. Kepemimpinan juga lebih menekankan pada kemampuan menggunakan persuasif untuk mempengaruhi pengikut.

Dalam melakukan penelitian terkait kepemimpinan, perlu dibedakan secara jelas antara kepemimpinan yang bersifat struktural atau manajerial dan kepemimpinan yang lebih berorientasi politik. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu ditegaskan kembali bahwa selain memahami konsep kepemimpinan, perlu juga memahami konsep kepemimpinan politik.

Jadi, seperti yang dikatakan Pareto²⁰, elit adalah mereka yang memegang nilai-nilai paling berharga dalam masyarakat (prestise, keyakinan, otoritas, dll) juga berbeda dengan elit politik. memiliki kekuasaan politik berbeda dengan memiliki kepemimpinan politik, karena dua hal, yaitu jenis sumber pengaruh yang digunakan dan tujuan penggunaan pengaruh.

Istilah politik dalam kepemimpinan politik menunjukkan bahwa kepemimpinan terjadi di suprastruktur politik (lembaga pemerintah) dan infrastruktur politik (partai politik dan organisasi masyarakat). Oleh karena

²⁰ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, (Jakarta: Grasindo, 1990), 134.

itu, pemimpin politik juga berbeda dari kepala lembaga karena kepala lembaga menggunakan lebih banyak wewenang dalam mempengaruhi bawahan. Tidak seperti kepala lembaga yang cenderung memobilisasi bawahan melalui hubungan formal dan impersonal, pemimpin politik menggunakan hubungan yang lebih informal dan pribadi untuk memobilisasi pengikut untuk mencapai tujuan tertentu.

Namun, orang-orang yang secara formal mengepalai elit atau institusi politik dapat mengambil peran kepemimpinan politik jika mereka memenuhi kualitas kepemimpinan ini. Penyelenggara politik dan pemerintahan yang sukses biasanya adalah orang-orang yang memiliki akses ke berbagai cara untuk memanfaatkan sumber pengaruh mereka, tergantung pada keadaan dan sifat masalahnya. Selain itu, kepemimpinan politik juga dapat dipahami dalam tiga perspektif: 1) kepemimpinan sebagai pola perilaku. 2) kepemimpinan sebagai kualitas personal. 3) kepemimpinan sebagai nilai politik. Sebagai pola perilaku, kepemimpinan terkait sekali dengan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mengupayakan tujuan yang diharapkan.

Kepemimpinan politik diperlukan bahkan untuk mampu menghasilkan dukungan politik yang kuat, mampu mengelola potensi konflik secara tepat dan efektif, serta mampu secara konsisten memotivasi bawahan dan konstituennya. Optimis dan mampu keluar dari keterpurukan. Selain itu, ia menghubungkan dan berkomunikasi dengan setiap segmen, memberi contoh, memfasilitasi proses pendidikan dan

pencerahan politik, mewakili secara sehat proses sirkulasi elit dalam organisasi, dan menempatkan orang-orangnya. Ia berada pada posisi strategis dalam institusi politik negara yang ada. Kepemimpinan politik juga harus selaras dengan nilai-nilai inti demokrasi. Agar proses dan dinamika politik menjadi beradab, para pemimpin politik harus memiliki pemahaman yang benar tentang etika politik²¹.

2.2.3 Teori-teori Kepemimpinan

Sejarah lahirnya pemimpin tidak lepas dari fungsi akan kepemimpinan. Ia muncul bersama peradapan manusia sejak zaman Nabi-nabi dan nenek moyang yang terjadi kerjasama antar manusia dalam menjamin kelangsungan hidupnya. Dengan ringkasnya, pemimpin dan kepemimpinan dimanapun dan kapanpun selalu diperlukan baik sekarang maupun masa yang akan datang.

Adapun dari berbagai teori yang membahas tentang kepemimpinan, ada 4 teori tentang asal mula atau lahirnya pemimpin diantaranya²²:

1. Teori bakat alam, yakni pemimpin lahir karena mewarisi bakat yang diturunkan orang tua atau leluhur.
2. Teori sosial (traits theory), yakni pemimpin bukan diwariskan tetapi diciptakan dan dibentuk dari perilaku kolektif.

²¹ M. Alfian Alfian, *Menjadi Pemimpin Politik...*, 12

²² Andrew Heywood, *Politik edisi keempat...*, 531.

3. Teori keperluan organisasional, yakni pemimpin diciptakan oleh lingkungannya sebagai sebuah alat rasional atau birokratis²³.
4. Teori Keterampilan politik, yakni pemimpin yang memiliki keterampilan politik yang dapat dipelajari dan dipraktikkan. Bahkan pemimpin mampu membangun citra yang baik.

Banyak penelitian terdahulu tentang kepemimpinan menitikberatkan pada pengidentifikasian ciri-ciri kepribadian yang dikenal dengan kepemimpinan efektif. Pada tahun 1990-an muncul trend baru penelitian kepemimpinan. Para peneliti mulai memfokuskan perhatian mereka pada dua gaya manajemen yang kontras yaitu kepemimpinan transformasional vs transaksional. Pertama kali ide tentang kepemimpinan transformasional dikemukakan oleh Burns (1978) sedangkan konsepnya dikembangkan oleh Bass (1985).

Kepemimpinan transformasional mengembangkan hubungan positif dengan bawahan agar memperkuat performa bekerja dan organisasi. Manajer yang menampilkan kepemimpinan transformasional mendorong pekerja untuk melihat ke depan kebutuhan mereka sendiri dan juga menitikberatkan pada kepentingan kelompok secara keseluruhan. Rosener (1991) memberikan penekanan yang lebih besar pada perempuan dibanding laki-laki dalam gaya kepemimpinan transformasional.

Gaya kepemimpinan ini melibatkan partisipasi, motivasi dan kekuasaan (dengan kharisma), sedangkan pendekatan transaksional

²³ Ibid ..., 534.

melibatkan motivasi dengan memberikan reward dan punishment kepada karyawan. Burke dan Collins (2001) melaporkan hasil kajiannya bahwa perempuan mungkin lebih bisa menunjukkan bahwa mereka menggunakan sebuah gaya kepemimpinan interaktif dibanding laki-laki, yang disebut kepemimpinan transformasional.

Gaya kepemimpinan ini sangat berhubungan dengan tujuh *skill* manajemen secara umum yaitu (1) pendelagasian, (2) manajemen konflik, (3) *coaching* dan *developing*, (4) *personal organization* dan *time management*, (5) komunikasi, (6) adaptabilitas *personal*, serta (7) analisa masalah dan pengambilan keputusan.

Dalam penelitian ini akan berfokus terhadap teori transformasional dan transaksional Menurut French dan Raven²⁴, Teori kepemimpinan transformasional Teori kepemimpinan transaksional

Teori kepemimpinan transformasional, yakni teori kepemimpinan yang menitik beratkan pada pemimpin yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan terhadap segala hal (reformis) yang melekat dan tertanam dalam organisasi melalui penyempurnaan dan penciptaan visi dan misi yang jelas dan tegas serta kemampuan untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut.

Teori kepemimpinan transaksional yakni teori yang memandang bahwa kepemimpinan dipandang lebih dalam kaitannya dengan perilaku

²⁴ French dan Raven, "Pemimpin Transformasional, Pemimpin Transaksional, dan Dorongan Inovasi" (Jurnal Psikologi, 1996), 102.

pemimpin dan bagaimana perilaku mempengaruhi dan dipengaruhi kelompok pengikut. Dalam hal ini, antara pemimpin dan yang dipimpin terjadi transaksi atau pertukaran kepentingan yang saling menguntungkan.

Secara umum ada 2 (dua) gaya kepemimpinan khas perempuan yakni (1) kepemimpinan maskulin-feminim dan (2) kepemimpinan transformasional-transaksional. Salah satu teori yang menekankan suatu perubahan dan yang paling komprehensif berkaitan dengan teori kepemimpinan transformasional dan transaksional. a) Kepemimpinan Transformasional salah satu konsep kepemimpinan yang relevan dengan situasi masa kini dimana perubahan terjadi sangat cepat dan menuntut setiap organisasi untuk menyesuaikan diri.

Kepemimpinan transformasional sebagai pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan dengan cara-cara tertentu. Dengan penerapan kepemimpinan transformasional bawahan akan merasa dipercaya, dihargai, loyal dan tanggap kepada pemimpinnya. Bass dalam Gibson mendefinisikan kepemimpinan transformasional sebagai kemampuan untuk memberikan inspirasi dan memotivasi para pengikut untuk mencapai hasil-hasil yang lebih daripada yang direncanakan secara orisinal dan untuk imbalan internal.

Dalam buku *Women and The Leadership Quotient*²⁵ tersebut, ia mengemukakan 8 tipe kepemimpinan perempuan yaitu tipe *trustees*

²⁵ Shoya Zichy. *Women and The Leadership Quotient* hal 80

(kepercayaan), tipe *conservator* (yang memelihara), tipe *tactician* (yang mengutamakan taktik), tipe *realistic* (yang mengutamakan kenyataan yang realistis di lapangan), tipe *strategic* (yang mengutamakan langkah-langkah rasional untuk menguasai keadaan), tipe *inovator* (yang mengutamakan inovasi-inovasi dalam memecahkan masalah), tipe *mentor* (yang memberikan tekanan pada motivasi yang diberikan kepada pengikutnya), dan tipe *advocator* (yang memfokuskan pada upaya memotivasi para pengikutnya dengan ide-ide atau petunjuk yang cemerlang).

2.3 Telaah Pustaka

Penelitian tentang kepemimpinan dalam perspektif gender yang relevan dengan judul yang akan diteliti tentang “Kepemimpinan Hj St Suraidah Suhardi Sebagai Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam Perspektif Gender”. Adapun penelitian yang relevan sama dengan penelitian peneliti adalah sebagai berikut.

- a) St. Habibah dalam jurnalnya (2015) “Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Gender”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran perempuan yang berkembang di masyarakat baik dari aspek reproduksi, ekonomi, sosial, politik dan kepemimpinan Islam bahwa selama ini perempuan ditempatkan hanya sebagai the second gender. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitiannya, Perempuan yang memiliki keahlian atau kompetensi memimpin negara, boleh menjadi kepala negara dalam konteks

masyarakat modern karena sistem pemerintahan modern tidak sama dengan sistem monarki yang berlaku di masa klasik dimana kepala negara harus mengendalikan semua urusan kenegaraan.

b) Annisa Fitriani dalam jurnalnya (2015) "Gaya Kepemimpinan Perempuan" Penelitian ini difokuskan pada gaya kepemimpinan perempuan yang bertujuan menemukan model gaya kepemimpinan yang khas pada perempuan. Metode penelitian dilakukan berdasarkan kajian teoritis dari penelusuran jurnal-jurnal penelitian, buku dan makalah lainnya. Hasil penelitian-penelitian masalah gender umumnya menunjukkan tidak banyak perbedaan gender dalam hal organisasi. Namun jika gender dihubungkan dengan gaya kepemimpinan terlihat adanya gaya tertentu khas perempuan, tapi bukan karena perbedaan jenis kelamin, namun lebih pada faktor karakteristik/tuntutan pekerjaan. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh karakteristik pekerjaan dengan gaya kepemimpinan perempuan.

c) I Wayan Budiarta dalam jurnalnya (2022) "Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Keperabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan" penelitian yang difokuskan pada kepemimpinan politik perempuan. Jenis penelitian studi kepustakaan yang merupakan kajian kepustakaan yang bersumber dari buku, hasil penelitian terdahulu dan jurnal. Kepemimpinan perempuan dalam sistem kekerabatan purusa, bahwa sistem

budaya patriarkhi masyarakat Desa Adat di Bali yang memperhitungkan hubungan kekerabatan melalui garis purusa, tidak dapat dilepaskan dari struktur berpikir dan keyakinan masyarakat Bali yang monodualistik seperti tergambar dalam pelaksanaan hukum *rwabhinneda*. Legitimasi sejarah atas kepemimpinan politik perempuan tergantung dari sukses atau kegagalan kepemimpinan tidak disebabkan oleh jenis kelamin namun melalui cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan tiranik, otoriter dan sentralistik. Oleh karena itu, emansipasi perempuan yang digagas Raden Ajeng Kartini dapat dipahami sebagai landasan untuk mensubordinasi wanita harus dipahami ulang melalui perspektif budaya dan sosial.

Berdasarkan ketiga rujukan di atas, nampak letak perbedaan yang akan diteliti oleh peneliti dalam skripsi ini, peneliti yang fokus dalam melihat bagaimana kepemimpinan Hj Siti Suraidah Suhardi sebagai ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam perspektif Gender. Selain itu, lokasi penelitian yang dilakukan penelitian terdahulu juga memiliki perbedaan, yakni di Kabupaten Mamuju, Ibukota Provinsi Sulawesi Barat. Adapun perbedaan tema pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu kepemimpinan aktor politik dalam perspektif gender, dimana peneliti ingin melihat bagaimana perspektif gender dalam melihat kepemimpinan Siti Suraidah Suhardi. Persamaan dari penelitian terdahulu, terletak pada fokus

penelitian yakni kepemimpinan, akan tetapi lokasi penelitian yang berbeda, maka hasil penelitian yang akan didapatkan tentunya berbeda, dikarenakan karakter masyarakat dan budaya lokal di satu daerah dan daerah lainnya juga akan berbeda pula.

2.4 Skema Penelitian

